

**SKRIPSI PENELITIAN**

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN JENEPONTO**

**IRMAWATI**

**105710182211**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2015**

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN JENEPONTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**  
**IRMAWATI**  
**10571 01822 11**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Irmawati  
Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto  
NIM : 105710 1822 11  
Jurusan : IESP/ Ilmu Ekonomi Study Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 2015

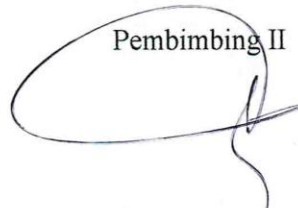
Menyetujui :

Pembimbing I



H. Sultan Sarda, SE., MM

Pembimbing II



Ismail Rasulong, SE., MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Makassar



D. H. Mahmud Nuhung, MA  
NBM : 497 794

Ketua Jurusan  
IESP



Hj. Haidah, SE, M. Si  
NBM : 602417

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor..... dan telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 13 November tahun 2015, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Dzulhijjah 1436

Makassar,.....

10 Oktober 2015

Panitia Ujian;

Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib M.Pd.  
(Rektor Unismuh Makassar)



Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA  
(Dekan fakultas Ekonomi & Bisnis)



Sekretaris : H. Sultan Sarda, SE, MM  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi & Bisnis)



Penguji :

- 1) H. Sultan Sarda, SE. MM
- 2) Ismail Rasulong, SE. MM
- 3) Drs. H. Hamzah Limpo, MS
- 4) Asri Jaya , SE.,MM



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang hanya kepada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan kepada-Nya pula aku memohon untuk dijauhkan dari rezeki yang haram. Dialah yang Maha Adil dan tiada Keadilan kecuali berasal dari-Nya. Segala puji bagi-Nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kami dan penulis mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mampu merangkai, mengungkapkan ide, gagasan serta menguak sebagian kecil ilmu Allah yang ada di dunia ini.

Shalawat dan salam Insya Allah tetap tercurah bagi pemimpin-pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya hingga yang terakhir nanti. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr.H. Irwan Akib, M.Pd
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA.
3. H. Sultan Sarda, SE., MM, selaku pembimbing I dan pembimbing II Ismail Rasulong, SE., MM atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Teristimewa untuk orang tuaku, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang berlimpah yang selalu diberikan.
5. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar pada khususnya yang telah mendidik dengan

ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Keluarga Besar Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 2011. Aisyah Binti Usman, Mirnawati, Rosmiati, Sinta Sriwahyuni, Ana Pertiwi, Ervina Srihasna, Andinova Rahmiati, Yulianti, Agusman, Darwana, Suriadi, Yusdi Muhammad Yunus. Dll. Dan Seluruh teman-teman yang ridak sempat penulis sebutkan satu Persatu yang telah memberi dorongan dan Semangat. Semoga kita semua menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan , selalu dalam satu cerita terindah di hati.
7. Sahabat-sahabatku yang tak tergantikan yang selalu mengisi hari-hariku selama ini terimakasih atas segala dorongan,semangat,motivasi dan kebersamaannya selama ini.

Semoga segala bantuan yang telah penulis terima bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan akan dibalas dengan balasan yang terbaik nantinya, Amin. Penulis menyadari bahwa pasti banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberi sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Makassar, 2015

Penulis

## ABSTRAK

Irmawati. 2015. Skripsi ini berjudul *“Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto.* Dibimbing oleh H. Sultan Sarda dan Ismail Rasulong.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif-kuantitatif serta referensi buku yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifat kualitatif - sehingga diolah menjadi data yang bersifat deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto” terbukti secara empiris dan dapat diterima. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil olah data SPSS yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,943 dengan Sig 0,003. t tabel 1.833 yang berarti bahwa t hitung (1.943) lebih besar dari t tabel (1.833) sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2013 ke tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan dengan berkurangnya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jeneponto berdasarkan data BPS tahun 2014. Dimana tahun 2013 jumlah keluarga miskin sebanyak 40.479 KK dan berkurang ditahun 2014 menjadi 36.336 KK. Ini berarti terdapat 4.143 KK yang mengalami perbaikan kesejahteraan atau sekitar 10.2% dari tahun 2013.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Alokasi Dana Desa (ADD).....	6
B. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD).....	8
C. Proses Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).....	9
D. Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).....	9
E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	11
F. Kebijakan Alokasi Dana Desa .....	14
G. Pembangunan Masyarakat Desa .....	26
H. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Metode Analisis.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	36
A. Sejarah, Kondisi Geografis dan Penduduk .....	36
1. Kondisi Fisik Wilayah .....	37
2. Administratif .....	40
3. Demografi .....	40
4. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	41
5. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	42
6. Keuangan dan Perekonomian Daerah .....	45
B. Keadaan Penduduk.....	54
1. Sosial dan Budaya.....	54
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah .....	56



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	64
A. Implementasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Jenepono .....	64
B. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Jenepono .....	73
C. Pembahasan .....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Jeneponto .....	39
Tabel 4. 2. Nama, Luas Wilayah perkecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan .....	40
Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 3 (tiga) Tahun Terakhir .	43
Tabel 4. 4. Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) Tahun .....	44
Tabel 4. 5. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2014.....	46
Tabel 4. 6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2014.....	48
Tabel 4. 7. Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2010 – 2014 .....	50
Tabel 4. 8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2011- 2014 .....	51
Tabel 4. 9. Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita.....	52
Tabel 4. 10. Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Jeneponto Tahun 2010- 2014 .....	53
Tabel 4. 11. Jumlah Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jeneponto.....	55
Tabel 4. 12. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan .....	56
Tabel 4. 13. Jumlah Rumah Per Kecamatan .....	56
Tabel 4. 14. Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi .....	62
Tabel 4. 15. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi.....	63
Tabel 5. 1. Nama Kecamatan dan Jumlah Perimbangan ADD.....	65

Tabel 5. 2. Jumlah Keluarga Miskin.....	67
Tabel 5. 3. Realisasi Alokasi Dana Desa Bontotangnga.....	69
Tabel 5. 4. Realisasi ADD Desa Balang Baru.....	71
Tabel 5. 5. Realisasi ADD Desa Pappalluang .....	72
Tabel 5. 6. Coefficients <sup>a</sup> .....	74
Tabel 5. 7. Model Summary .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jenepono.....	60
Gambar 2. Diagram SKPD terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Jenepono .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Wilayah Indonesia umumnya masih merupakan berbentuk desa atau yang disebut dengan nama lain, setidaknya hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa masih sekitar 70% warga Indonesia hidup dan mencari nafkahnya didesa.Bagaimanapun potretnya saat ini,desa merupakan bagian wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang mutlak harus diayomi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa,atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi,yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan bentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten /kota.

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan.Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang

dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi dana desa (ADD) berdasarkan perda pasal 211 ayat 5 pengelolaan keuangan desa tentang anggaran desa dan lembaga desa dilakukan oleh kepala desa tentang anggaran dan pendapatan serta belanja daerah, ini diharapkan kesejahteraan dan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan . apabila alokasi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. maka pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan sehingga mampu

menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Ekonomi Daerah seperti yang telah rencanakan oleh pemerintah di terapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Awal pelaksanaan otonomi daerah aspek kemandirian dan terkesan diabaikan, namun dengan seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik berat pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP),Peraturan Menteri dalam Negri (Permendagri) maupun keputusan Menteri Dalam Negri (Kepmendagri),yang mengatur tentang desa, baik itu PP,Permendagri,dan Kepmendagri yang dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai desa yang diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004.

Penyelenggaraan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya,sejak tahun 1999 yaitu sejak penerapan UU No 2 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pemerintah menerapkan

kebijakan pemberian dana segar(grant) ke desa-desamelalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tahun 2001 sebagai tahun efektif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, berarti usia kebijakan ADD telah mencapai 14 tahun. berarti sudah sekitar 14 tahun desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan. Pada tahun 2009 alokasi dana desa yang terealisasi sebesar 8,748,040,000, dan terjadi peningkatan pada alokasi dana desa tahun 2010 sebesar 13,445,889,976. Pada tahun 2011 alokasi dana desa menurun menjadi 12,068,589,000 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 13,965,616,874. Pada tahun 2013 alokasi dana desa yang terealisasi sebesar 1,165,000,000.

Diharapkan alokasi dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembanguna pedesaan secara gotong-royog. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.



Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Jeneponto tahun 2009-2013.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar Pengaruh ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten Jeneponto.”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh ADD terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Jeneponto.
2. Sebagai bahan informasi kepada desa di Kabupaten Jeneponto tentang apa dan bagaimana kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jeneponto.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Astuti (2011: 54).

##### **1. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)**

Adapun tujuan dengan adanya ADD yaitu:

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian  $APBDS = PADes + ADD$
- b. Untuk memberi keleluasan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

##### **2. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)**

Beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan

desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.

- b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermamfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD Bagi Desa, yaitu:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- e. Desa tidak lagi tergantung pada swadanya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta social kemasyarakatan.
- f. Mendorong terciptanya demokrasi desa.
- g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dll dapat tercapai.

#### Penerima Manfaat ADD

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa (LPM,PKK,dll)
- d. Masyarakat Desa

### **B. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dasar Hukum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam:

1. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 ayat 3);
2. Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c);
3. Peraturan menteri Dalam Degeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan ADD;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomot 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada Provinsi (evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.

### **C. Proses Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Tahapan dan proses penyusunan kebijakan ADD ini mengikuti prinsip dan cara penyusunan kebijakan daerah yang partisipatif. kebijakan ADD yang partisipatif disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tahapan sebagai berikut:

1. Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakan daerah.
2. Mempersiapkan tim penyusun kebijakan ADD.
3. melaksanakan proses penyusunan kebijakan ADD secara partisipatif.
4. Menjalankan bentuk kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

### **D. Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD kabupaten/kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Sumber Daya Alam, ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Sumber Anggaran ADD = Dana perimbangan Daerah (DAU, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA) – Belanja Pegawai Daerah X minimal 10%.

Kebijakan ADD merupakan kebijakan daerah, dengan hukum PERDA atau PERBUP. Masyarakat harus tau dan biasa memperoleh payung hukum kebijakan daerah ini diperoleh, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencantumkan kebijaksanaan ADD (UU Nomor 28 tahun 1999).

Setelah memastikan bahwa kebijakan ADD tercantum dalam RKPD, langkah berikutnya mencari informasi didalam dokumen kebijakan umum APBD (KUA). Dalam dokumen KUA ini, seperti diatur oleh Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dapat diketahui ADD menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dengan plafond anggaran yang besarnya sudah ditentukan. Dokumennya disebut PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).

Adanya dokumen KUA dan PPA, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk setiap satuan Kerja pemerintahan Daerah (SKPD). Dalam SE Bupati ini akan diketahui instansi yang ditugasi untuk mengelola pelaksanaan ADD (biasanya Badan

Pemberdayaan masyarakat), masyarakat dapat memastikan bentuk kegiatan pelaksanaan ADD dan besaran anggaran yang direncanakan. RKA tentang ADD yang disusun SKPD ini masih bersifat alokasi belanja untuk APBD, belum dibagi ketiap-tiap desa.

## **E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

### **1. Prinsip Dasar Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yaitu:

#### **a. Partisipatif**

Proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, BPD, Pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan pemuda dan sebagainya.

#### **b. Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi

mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2. Keberpihakan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD harus berpihak kepada masyarakat desa. Agar ADD dapat secara nyata berpihak ke masyarakat desa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, baik fisik, non fisik, SDM, ekonomi dan social budaya. Dan sisanya maksimal 30% untuk belanja rutin/operasional, seperti: Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bantuan Tunjangan Anggota BPD, Biaya Operasional sekretariat Desa, Biaya operasional sekretariat BPD, Biaya Operasional Seketariat LPM dan belanja perjalanan dinas. Untuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dari APBD sebagaimana diatur dalam Surat Kawat Mendagri Nomor : 140/184/SJ tanggal 17 Agustus 2006.



Sebagai langkah Awal, desa harus terlebih dahulu merencanakan Penggunaan APBDes (Dimana ADD masuk didalamnya) berdasarkan penggalan kebutuhan dari masyarakatnya. PP Nomor 72 tahun 2005 pasal 64 mengamanatkan setiap desa harus menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Desa) tahunan. Secara umum, tahapan yang biasa dilakukan dalam proses perencanaan dan penganggaran RKPDes adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Mekanisme Perencanaan di Desa

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang terlibat
1. Tahap Perencanaan Pembangunan Desa		
a. Menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan dusun/kampung/RT/RW	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Dusun/kampung/RT/RW	Seluruh warga, kepala dusun, ketua RT/RW, kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat yang ada didusun serta lembaga terkait lainnya (LSM, Lembaga adat, dll)
b.1 Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun/kampung/RT/RW	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang)	Kepala Desa, kepala Dusun, masyarakat dan lembaga yang ada di desa (LSM, Lembaga adat, dll)
b.2 Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan		
b.3 Mengkonsultasikan hasil prioritas kegiatan pembangunan.		
b.4 menyusun usulan yang diterima dalam format BPBDes (pos-pos pendapatan dalam belanja)		
b.5 pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD		
b. Tahap pembahasan		

anggaran desa		
b.1 Mengkonsultasikan RAPBDes ke masyarakat melalui BPD	Rapat /Musyawarah	BPD, Masyarakat desa dan lembaga desa yang ada didesa (LSM,Lembaga adat dll)
b.2 Pensunan tanggapan,proteksi dan usulan perbaikan		
b.3 perumusan dan penetapan persetujuan		
c. Penetapan pengesahan dan pengundangan (menjadi PERDES mengenai APBDes)	Rapat paripurna pengesahan RAPBDes menjadi APBDes	Kepala Desa, BPD dan masyarakat
Sosialisasi	Pengumuman dan sosialisasi mlalui saluran-saluran komunikasi yang ada didesa.	

Sumber : Astuti (2011 : 25)

## **F. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh bebupaten/kota (pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). ( tim FPPD, 2005,5).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten,

propensi dan pemerintah pusat, perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing 10% untuk dana alokasi desa yang diatur dalam pasal 68 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Ini diharapkan kesejatraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat diwujudkan untuk mencapai tingkat kesejateraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Selain untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejatraan pembangunan dipedesaan, alokasi dana desa tersebut juga diharapkan akan membuka peluang kepada desa untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan bagi kesejatraan rakyatnya, desa dapat menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan praskarsa dan inisiatif masyarakat dan membuka peluang dalam melaksanakan pembangunan yang lebih bermartabat sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Undang-Undang 32 tahun 2004 juga mengatur tentang desa memperoleh dana perimbangan yang diperoleh kabupaten dari pusat. Sumber alokasi dana desa tersebut berawal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana pertimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana olokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamai alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus

rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Jadi secara tidak langsung Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari dana alokasi umum kabupaten/lkota sebesar 10% dalam rangka otonomi daerah yakni memberi kepercayaan yang diberikan kepada desa untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Hak desa atas dana perimbangan tersebut diperjelas dengan lahirnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, untuk mendukung proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa diminta kepada bupati/walikota agar menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota.
2. Dari retribusi kabupaten/kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten/kota sebagai diperuntukan bagi desa,
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana Pemerintah Keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. (Asam Awang,2010;116).

Pemberian alokasi dana desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMd
2. Desa menyusun rencana anggaran
3. Desa mengajukan program dan anggaran
4. Penyaluran dana ke desa

Mekanisme diatas tentunya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) tidak perlu menu-menu pembangunan dari atas dalam artian bahwa dalam membuat program desa disusun langsung oleh desa bersama warga masyarakatnya melalui rembug desa, tidak diintervensi dari luar dan bertanggungjawab kepada pemberi mandat bukan kepada supra desa yakni kepada masyarakat desa itu sendiri.

Alokasi dana desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 yakni sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan alokasi dana desa (ADD).
2. Alokasi dana desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi dana desa yang digunakan untuk belanja operator dan oprasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa;
- f. Untuk tunjangan BPD
- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainya yang melawan hukum. ( tim FPPD,2005,8)

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dan lain-lain
- b. Pernyataan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemungkiman
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.

h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Dari beberapa arah penggunaan ADD diatas dapat dijadikan indikator dana yang digunakan pembangunan dan prasarana desa yakni sebagai berikut:

a. Bagi pemerintahan desa yakni:

1. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa.
2. Pembuatan dan perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.

b. Pemberdayaan masyarakat

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, jembatan, los pasar, lumbung pangan dan lain-lain.
2. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
3. Pembuatan lampu desa
4. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
5. Pengembangan sosial budaya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Alokasi dana desa untuk biaya penyelenggaraan dan pemberdayaaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai

kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Pencapaian kemajuan suatu sarana dan prasarana desa, maka perlu adanya pembangunan, pembangunan suatu wilayah dapat berjalan dengan baik tentu adanya tahapan-tahapan pembangunan agar apa yang menjadi idelisme pembangunan yang terencana berjalan melalui program kegiatan yang ada di pemerintah desa.

Program pembangunan desa pada dasarnya adalah merupakan suatu rencana atau usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk merubah suatu kondisi dari yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang di konsepskan sebagai usaha pemerintahan belaka tetapi pembangunan tergantung pada suatu usaha masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana menuju kondisi yang lebih baik. Sedangkan Arif Budiman berpendapat bahwa di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal, dalam memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Sering kali kemajuan



yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Dengan demikian kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan ekonomi.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat desa baik itu polah pikir, cara pandang, mata pencaharian dan yang lainnya dalam rangka menumbu kembangkan sikap dan polah pikir agar lebih maju, kreatif dan inovatif.

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam suatu pembangunan desa. Karena sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam pembangunan masyarakat yakni penunjang utama pembangunan desa unntuk kelangsungan hidup masyarakat.

Menurut Soepartono sarana dan prasarana adalah sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam sesuatu pelaksanaan, dalam hal ini adalah kegiatan pembangunan desa. Sedangkan prasarana didefenisikan sebagai sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen salah satunya sifat tersebut adalah sulit dipindakan”. Sedangkan menurut Ali, sarana dan prasarana adalah semua yang menunjang segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai.

Dari kedua pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah segala sesuatu baik itu berupa alat atau pun tempat yang dapat menunjang/ mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yakni dalam hal ini adalah tujuan dari pembangunan desa. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah diantaranya jalan dan angkutan sebagai sarana prasarana transportasi, gedung gereja maupun gedung masjid sebagai sarana dan prasarana spritual masyarakat, persediaan air bersih bagi masyarakat, dibidang kesehatan ada yang namanya sarana pelayanan kesehatan dan lain-lain. Intinya pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan pembangunan infrastuktur desa.

Sarana dan prasarana desa adalah salah satu yang memegang peran penting dalam kelancaran proses pembangunan. Malalui pembangunan prsarana masyarakat dapat dibantu untuk meningkatkan aksesibilitasnya didalam maupun meningkatkan mobilitas serta aktivitas penduduk desa secara keseluruhan. Sedangkan pembangunan sarana dasar pedesaan dimaksudkan untuk mengkomodasikan kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan yang memadai dan mempermudah akses mereka dalam mendapatkan pelayanan yang dimaksudkan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan desa yang semakin maju, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang

berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya. Berbagai upaya pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana umum di desa dapat kita lihat, yang meliputi:

a. Pemerintah desa

Tersedianya prasarana fisik seperti gedung kantor desa, dan fasilitas-fasilitas desa untuk keberlangsungan pemerintahan desa.

b. Pertanian

Membangun pengairan atau irigasi untuk sektor pertanian yang digunakan untuk sektor produksi pangan desa.

c. Perhubungan

Meningkat kinerja sistem transportasi dan telekomunikasi melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan.

d. Kesehatan

Meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat beserta dokternya.

e. Pendidikan

Membangun fasilitas pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah serta menyediakan tempat belajar yang nyaman dalam proses belajar dan mengajar.

f. Prasarana pemasaran.

Membangun pasar desa dan fasilitas-fasilitas pasar seperti kios pasar,

dan gudang pasar untuk keberlangsungan kegiatan pemasaran dan transaksi jual beli masyarakat desa.

g. Lampu Desa

Membangun lampu desa guna untuk penerangan masyarakat desa

h. Jalan desa

Pembangunan jalan desa supaya mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi.

i. Jembatan.

Membangun jembatan desa, untuk menghubungkan dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transportasi. ([www.sarana dan prasarana desa. Com](http://www.sarana-dan-prasarana-desa.com))

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa itu, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang ada didalamnya.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa harus didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat sasaran, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan.

Dalam kaitanya dengan alokasi dana desa yang membagi pembangunan anggaran ke dalam dua macam yaitu untuk pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat maka disini dapat kita lihat di langan pasti ada skala proritas pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yakni sebagai berikut:

1. Skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana pemerintah atau masyarakat.
2. Skala prioritas anggaran pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan atau masyarakat.
3. Adanya skala prioritas kepada masyarakat atau elit.

Secara jujur harus diakui sampai dengan saat ini pembangunan desa telah dilaksanakan. Hanya saja hasil jauh seperti yang diharapkan, sebab hingga saat ini masyarakat dipedesaan pada umumnya masih tetap dalam kemiskinannya malah ada tendensi timbulnya ketergantungan masyarakat desa kepada pemerintah.

Pemerintah desa merupakan salah satu elemen dari skian banyak stake holders dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pergeseran pradigma dari konsep government ke governance, maka proses pemerintahan desa harus bersendikan pada kepercayaan serta kemitraan antara elemen dalam masyarakat

Dari urayan-urayan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa adalah penyedian segala sesuatu baik itu alat atau pun tempat yang digunakan sebagai penunjang dalam proses kegiatan pembangunan kearah perubahan yang direncanakan

dengan pendayagunaan segala potensi yang dimiliki sekelompok masyarakat di desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

### **G. Pembangunan Masyarakat Desa**

Sebagian besar penduduk jenepono saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman perdesaan. Kawasan pedesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman pedesaan. Penduduk dan angkatan kerja pedesaan yang akan terus bertambah sementara luas lahan pertanian relative tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif, karena itu, sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (non-farm activities) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat.

Menurut Surjadi (1995 : 1) permasalahan didalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya asset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi keterampilan dan teknologi, informasi serta jaringan kerja sama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan

dan rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled),lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat,lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan lintas bidang alam pengembangan kawasan pedesaan.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatannya lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental ( jiwa), fisik (raga),intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Menurut Maskun Sumitro (1994:49) Kebijakan Pembangunan Wilayah Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.

2. Pemantapan pengelolaan pemamfaatan ruang dan pengendalian pemamfaatan ruang untuk menciptakan ligkungan kehidupan yang efesien, efektif dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
4. Meningkatnya prasarana Wilayah pada daerah tertinggal,terpencil dan daerah perbatasan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah dan
7. Pembangunan Perdesaan.

Akan tetapi sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam pengembangan Desa adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di pedesaan.
3. Meningkatnya akses,control dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat.tidak ada alas an untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di Indonesia mekanisme perencanaan



pembangunan baik yang berlaku di usat maupun didaerah diatur melalui Peraturan menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1982 tentang P5D atau 9Pedoman Peenyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), Namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang,regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat,bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi penigktan pemberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaanya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hany sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya, hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih di prioritaskan kepad pemulihan kehidupan social ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Haw. Widjaja (2013)

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2008-2013 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1.

M

memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal social masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.

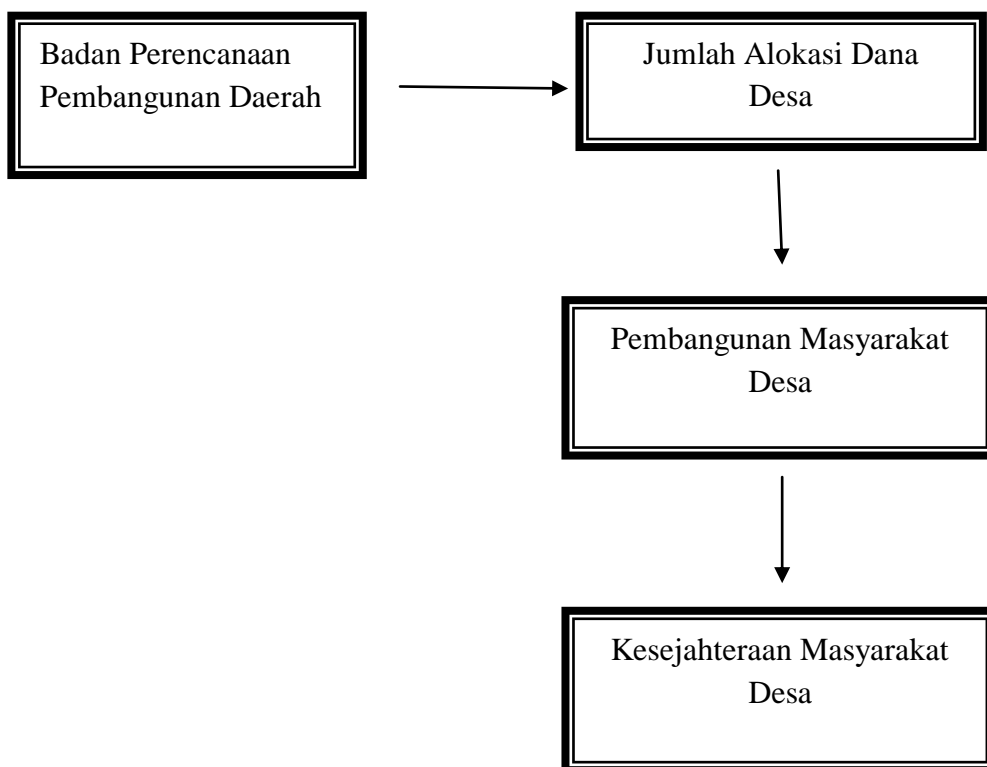
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

## **H. Kerangka Pikir**

Keberhasilan suatu program pembangunan pada dasarnya di tentukan oleh tersedianya dana SDM yang cukup memadai tergantung pola pada cara pengelolaan sumber yang ada dengan potensi yang di miliki suatu daerah. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan

perdesaan maka Alokasi Dana Desa sangat di perlukan untuk membiayai pembangunan yang akan di laksanakan. apa bila modal yang tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pembangunan yang akan dilaksanakan menjadi lebih lancar. dengan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang betul-betul efektif, maka dapat menunjang kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

**Gambar 2.1**



### **I. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ Diduga Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan April.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data kualitatif, yaitu semua data atau informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kuesioner dan lisan dengan mewawancarai langsung masyarakat umum.
- b. Data kuantitatif merupakan semua data atau informasi yang sifatnya terukur atau dapat dibahasakan dengan angka-angka.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan di peroleh dengan menerangkan data sekunder, yaitu yang bersumber dari instansi terkait melalui pencatatan, disamping itu ditunjang data-data kepustakaan, Adapun instansi yang dikunjungi untuk pengumpulan data yang dibutuhkan adalah: Badan pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Pengumpulan data yang bersifat teori dengan cara membaca buku-buku dan bahan kuliah yang relevan dengan bahan yang diteliti.

### **D. Metode Analisis**

Untuk menganalisa data, digunakan analisis statistik inferensial, yaitu regresi sederhana dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Kesejahteraan masyarakat dari PDRB perkapita

x = Dana alokasi Desa

a = Konstanta (Nilai Y jika x=0)

b = Koefesien regresi



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa. Kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500-1400 m, bagian tengah 100-500 m dan pada bagian selatan 0-150 m di atas permukaan laut.

#### **A. Sejarah, Kondisi Geografis dan Penduduk**

Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Bontosunggu sebagai salah satu sentra produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km<sup>2</sup> atau 74.979 Ha, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5°23'12" - 5°42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119°29'12" - 119°56'44,9" Bujur



Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

## **1. Kondisi Fisik Wilayah**

### **a. Kondisi Topografi dan Kelerengan**

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam 5 (Lima) kategori yaitu :

- Kemiringan lereng 0 – 2 %, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, Bangkala dan Bangkala Barat;
- Kemiringan lereng 2 – 8 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Rumbia;
- Kemiringan lereng 9 – 15 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Bangkala dan Rumbia;
- Kemiringan lereng 16 - 25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan;
- Kemiringan lereng 41 – 60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Kelerengan sangat terkait dengan kondisi drainase, yaitu keadaan tergenangnya bagian permukaan tanah oleh air pada saat tertentu, yang tidak ditujukan khusus seperti kolam dan lainnya. Keadaan drainase disuatu tempat ditentukan oleh kemiringan

tanahnya, semakin tinggi dan semakin bervariasi kemiringan maka cenderung drainasenya makin baik. Keadaan tofografi di Kabupaten Jeneponto yang bervariasi mulai dari datar sampai curam agak menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang semakin baik dan berfungsinya saluran pengairan menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika terjadi banjir dan bencana alam lainnya. Daerah yang kadang tergenang terdapat di Kecamatan Binamu, dan Arungkeke dengan luasan yang sempit.

Selanjutnya adalah masalah erosi yang terjadinya dipengaruhi oleh kemiringan tanah, ketinggian tempat, tekstur, jenis tanah, curah hujan dan tumbuhan penutup tanah (vegetasi). Oleh karena itu keadaan erosi disuatu tempat akan bervariasi tergantung dari banyaknya faktor pendukung terjadinya erosi yang ada ditempat itu. Berdasarkan terkikisnya tanah permukaan, maka tanah di Kabupaten Jeneponto dibedakan atas daerah yang ada erosi dan tidak erosi.

#### **b. Iklim dan Curah Hujan**

Keadaan iklim Kabupaten Jeneponto adalah identik dengan keadaan iklim wilayah lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada temperatur udara maksimum 35 °C dan suhu udara minimum 26 °C dengan jumlah curah hujan terendah 1.049 mm/tahun dan tertinggi 3.973 mm/tahun.

### c. Hidrologi

Kondisi hidrologi pada umumnya di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (*catchmen area*) dan sistem sungainya.

Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan dan jenis lapisan batuan. Pada wilayah Kabupaten Jeneponto, sistem jaringan sumber daya air meliputi DAS Binanga Cikoang (2.085 Ha), DAS Binanga Lumbua (13.058 Ha), DAS Binanga Pangkajene (17.012 Ha), DAS Binanga Topa (5.130 Ha), DAS Binanga Papa (7.087 Ha), DAS Jeneponto (12.259 Ha) serta DAS Tarowang (18.349 Ha).

Tabel 4. 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Jeneponto

<b>No.</b>	<b>Nama DAS</b>	<b>Ha</b>
	DAS Binanga Cikoang	2.085
	DAS Binanga Lumbua	13.058
	DAS Binanga Pangkajene	17.012
	DAS Binanga Topa	5.130
	DAS Binanga Papa	7,087
	DAS Jeneponto	12.259
	DAS Tarowang	18.349

Sumber : Bappeda Kab. Jeneponto, 2014

## 2. Administratif

Gambaran administrasi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 4. 2. Nama, Luas Wilayah perkecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Luas Wilayah Administrasi		Luas Wilayah Terbangun	
		Km2	(%) thd total	Km2	(%) thd total
Kecamatan Batang	14	121,82	16,25	1,36	5,08
Kecamatan Bangkala Barat	8	152,96	20,40	2,44	9,12
Kecamatan Tamalatea	12	57,58	7,68	1,62	6,05
Kecamatan Bontoramba	12	88,30	11,78	2,19	8,19
Kecamatan Binamu	13	69,49	9,27	3,09	11,56
Kecamatan Turatea	11	53,76	7,17	0,76	2,84
Kecamatan Batang	6	33,04	4,41	4,29	16,04
Kecamatan Arungkeke	7	29,91	3,99	2,33	8,71
Kecamatan Tarowang	8	40,68	5,43	4,18	15,63
Kecamatan Kelara	10	43,95	5,86	1,99	7,44
Kecamatan Rumbia	12	58,30	7,78	2,49	9,31
TOTAL	113	749,79	100	2.674	100,00

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2014

## 3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sebanyak 348.138 jiwa yang terdiri dari 169.025 jiwa penduduk laki-laki dan 179.113 jiwa penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bangkala yaitu sebesar 50.650 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan lebih banyak dibanding

penduduk laki-laki. Hal ini dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) yang lebih kecil dari 100. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sebesar 94,36%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk per  $\text{Km}^2$  dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2012 sekitar 464 jiwa/ $\text{Km}^2$ . Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binamu yaitu sekitar 766 jiwa/ $\text{Km}^2$ . Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bangkala Barat yaitu sekitar 175 Jiwa/ $\text{Km}^2$ .

#### **4. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan

pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun terakhir. Data jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 342.700 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 346.149 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan jumlah penduduk yang tidak menentu. Dimana pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 3.449 jiwa, sedangkan pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2011 ke tahun 2012 sekitar 2009 jiwa.

### **5. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto digunakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,79% seperti yang dilangsir oleh Bappeda 2012. Dengan Menggunakan persentase laju pertumbuhan tersebut maka untuk menghitung proyeksi pertumbuhan penduduk 5 (lima) tahun kedepan dipakai rumus pertumbuhan Linier. Berikut rumus proyeksi jumlah Penduduk;

$$P_n = P_0 \cdot (1 + r)^n$$

$P_n$  = Proyeksi Jumlah Penduduk tahun berikutnya

$P_0$  = Jumlah penduduk Sekarang

$r$  = Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk

$n$  = Jumlah Tahun Proyeksi

Adapun tabel proyeksi pertumbuhan penduduk 5 (lima) tahun kedepan dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 3 (tiga) Tahun Terakhir

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan			Kepadatan Penduduk		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Bangkala	49.859	50.361	50.650	11.395	17.356	17.868	5,65	1,00	0,57	409	413	416
Bangkala Barat	26.340	26.605	26.758	5.589	1.370	13.725	9,62	1,00	0,57	172	174	175
Tamalatea	40.351	40.757	40.991	9.039	18.067	18.709	2,62	1,00	0,57	701	708	712
Bontoramba	34.975	35.327	35.530	7.794	5.519	5.838	-1,88	1,00	0,57	396	400	402
Binamu	52.420	52.948	53.252	11.172	7.424	8.284	7,24	1,00	0,57	754	762	766
Turatea	29.919	30.220	30.394	6.642	8.258	8.807	2,53	1,00	0,57	557	562	565
Batang	19.192	19.385	19.496	4.347	10.372	10.706	-1,12	1,00	0,57	581	587	590
Arungkeke	18.233	18.416	18.522	4.209	10.382	10.738	2,36	1,00	0,57	609	616	619
Tarawang	22.337	22.562	22.692	4.957	5.745	6.035	2,23	1,00	0,57	549	555	558
Kelara	26.440	26.706	26.860	6.278	5.196	5.880	-2,76	1,00	0,57	601	608	611
Rumbia	22.634	22.862	22.993	5.108	6.980	7.228	-4,78	1,00	0,57	388	392	394
TOTAL	342.700	346.149	348.138	76.530	96.669	113.818	1,97	1,00	0,57	457	462	464

Sumber : BPS Tahun 2012, 2013, dan 2014

Tabel 4. 4. Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) Tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah KK					Tingkat Pertumbuhan Penduduk				Kepadatan Penduduk (org/km <sup>2</sup> )				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Bangkala	124.847	196.010	307.736	483.145	758.358	44.043	69.147	108.561	170.441	267.592	57	57	57	57	1.024,9	1.609	2.526	3.966	6.225
Bangkala Barat	65.956	103.551	162.574	255.242	400.730	33.831	53.114	83.389	130.921	205.547	57	57	57	57	431,20	677	1.063	1.669	2.620
Tamalatea	101.039	158.631	249.050	391.009	613.884	46.116	72.401	113.671	178.463	280.187	57	57	57	57	1.754,8	2.755	4.325	6.791	10.661
Bontoramba	87.578	137.497	215.871	338.917	532.100	14.390	22.592	35.470	55.688	87.430	57	57	57	57	991,8	1.557,2	2.445	3.838	6.026
Binamu	131.261	206.079	323.545	507.965	797.506	20.419	32.058	50.331	79.020	124.062	57	57	57	57	1.888,9	2.965,6	4.656	7.310	11.477
Turatea	74.918	117.622	184.666	289.925	455.183	21.708	34.082	53.509	84.009	131.894	57	57	57	57	1.393,6	2.187,9	3.435	5.393	8.467
Batang	48.056	75.447	118.452	185.970	291.973	26.389	41.431	65.047	102.123	160.334	57	57	57	57	1.454,5	2.283,5	3.585	5.629	8.837
Arungkeke	45.655	71.678	112.535	176.679	277.387	26.468	41.555	65.241	102.428	160.813	57	57	57	57	1.526,4	2.396,5	3.762	5.907	9.274
Tarowang	55.934	87.816	137.871	216.457	339.837	14.876	23.355	36.667	57.567	90.381	57	57	57	57	1.374,9	2.158,7	3.389	5.321	8.354
Kelara	66.207	88.466	163.194	256.215	402.257	14.493	22.755	35.725	56.089	88.059	34	84	57	57	1.506,4	2.012,9	3.713	5.830	9.153
Rumbia	56.675	88.980	139.699	219.328	344.345	17.816	27.972	43.915	68.947	108.247	57	57	57	57	972,1	1.526,2	2.396	3.762	5.906
TOTAL	858.258	1.331.777	2.115.193	3.320.852	5.213.560	280.549	440.462	691.526	1.085.696	1.704.546	55	59	57	57	1.144,6	1.776,2	2.821	4.429	6.953

Sumber : Proyeksi Jumlah Penduduk Pokja AMPL Kab.Jeneponto



## **6. Keuangan dan Perekonomian Daerah**

Pembangunan ekonomi selalu menjadi sentral dan lokomotif pembangunan bidang lain, oleh karena itu dalam penyusunan strategi pembangunan selalu dimulai dengan pemetaan serta analisa mendalam tentang kondisi perekonomian yang sedang dihadapi dan prospek pengembangannya yang didasari oleh asumsi terhadap variabel yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu sendiri.

Pada bagian ini menjelaskan terkait kondisi keuangan dan perekonomian daerah, dimana pembiayaan dibidang sanitasi dianggarkan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah antara Lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, dan Dinas Kesehatan.

Tabel 4. 5. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2014

No.	Realisasi Anggaran	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	
A	Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.186.787.291,85	12.481.649.763,00	14.947.179.265,77	13.538.538.773,54	0,88
a.1.1	Pajak Daerah	3.348.614.134,00	3.273.257.843,00	3.976.488.557,00	3.532.786.844,67	1,80
a.1.2	Retribusi Daerah	4.000.070.830,00	3.078.130.110,00	3.105.596.239,00	3.394.599.059,67	(5,32)
a.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg sah	2.941.296.821,85	4.025.684.926,00	3.958.747.743,77	3.641.909.830,54	7,38
a.1.4	Lain-Lain pendapatan daerah yang sah	2.896.805.506,00	2.104.576.884,00	3.906.346.726,00	2.969.243.038,67	0,83
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	392.545.717.140,72	443.070.850.332,00	528.943.116.806,00	454.853.228.092,91	5,03
a.2.1	Dana Bagi Hasil	34.260.940.140,72	29.596.995.332,00	29.353.410.806,00	31.070.448.759,57	(3,21)
a.2.2	Dana Alokasi Umum	314.827.177.000,00	355.584.155.000,00	437.703.926.000,00	369.371.752.666,67	5,47
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	43.457.600.000,00	57.889.700.000,00	61.885.780.000,00	54.411.026.666,67	7,78
a.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	110.751.929.544,46	153.795.872.622,41	85.642.345.740,03	116.730.049.302,30	1,77
	Hibah	463.086.976,00	53.381.000,00	-	172.155.992,00	(28,09)
a.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari prov. Ke		13.013.521.264,41	13.906.706.200,03	11.943.379.977,97	10,25

	kab/kota	8.909.912.469,46				
a.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	25.427.112.967,00	67.566.609.480,00	54.459.862.000,00	49.151.194.815,67	24,56
a.3.5	Bantuan Keuangan dr Prov/Pemerintah lainnya	12.895.858.000,00	14.346.220.878,00	17.275.777.540,00	14.839.285.472,67	4,79
B	Belanja (b.1 + b.2)	577.447.730.280,90	680.831.828.455,00	610.993.765.554,00	721.556.096.174,07	7,71
b.1	Belanja Tidak Langsung	302.438.497.632,49	345.606.679.910,00	369.835.814.279,00	457.875.254.784,07	14,82
b.1.1	Belanja Pegawai	272.201.352.011,00	319.499.514.578,00	350.987.101.475,00	396.113.874.480,00	13,32
b.1.2	Bunga	285.826.313,49	285.826.000,00	297.672.000,00	330.380.304,07	4,95
1.3	Subsidi	-	-	-	-	-
b.1.4	Hibah	11.911.200.000,00	8.752.730.000,00	2.378.280.000,00	29.101.000.000,00	34,68
b.1.5	Bantuan Sosial	3.431.879.332,00	3.998.729.332,00	1.700.000.000,00	2.800.000.000,00	(6,56)
b.1.6	Belanja Bagi hasil	-	-	-	-	-
b.1.7	Bantuan Keuangan	13.608.239.976,00	12.069.880.000,00	13.972.760.804,00	13.530.000.000,00	(0,19)
b.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	16.000.000.000,00	151,98
b.2	Belanja Langsung	275.009.332.648,00	335.225.148.545,00	241.157.951.275,00	263.680.841.390,00	(1,39)
b.2.1	Belanja Pegawai	46.122.468.300,00	74.933.205.150,00	53.797.703.215,00	54.785.603.000,00	5,91
b.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.702.750.616,00	82.577.636.845,00	78.441.995.785,00	86.474.925.640,00	5,47
b.2.3	Belanja Modal	155.184.113.732,00	177.714.306.550,00	108.948.252.275,00	122.420.312.750,00	(7,60)
C	Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit Anggaran	27.429.164.984	10.381.531.365	128.677.863.004	194.194.413.394	376,08

Sumber : Bappeda Kab.Jeneponto 2014

Tabel 4. 6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2014

No.	S K P D	Tahun				Rata2 pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
1	DINAS PU CIPTA KARYA	-	850.000.000	-	-	-
1.a	Investasi	-	850.000.000	-	-	-
1.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-
2	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	649.610.000	-	-	-	-
2.a	Investasi	649.610.000	-	-	-	-
2.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-
3	DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	-	-	-	1.050.500.000	-
3.a	Investasi	-	-	-	1.050.500.000	-
3.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-
4	DINAS KESEHATAN	-	222.276.700	98.822.000	640.855.000	246,47
4.a	Investasi	-	57.626.000	34.602.000	64.560.000	
4.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	164.650.000	64.220.000	576.295.000	
5	BAPPEDA	-	-	-	-	-
5.a	Investasi	-	-	-	-	-
5.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-
6	BPMD	-	-	-	-	-
6.a	Investasi	-	-	-	-	-
6.b	Operasional / Pemeliharaan (OM)	-	-	-	-	-
7	Belanja Sanitasi (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	649.610.000	1.072.276.700	98.822.000	1.626.795.000	506,82
8	Pendanaan Investasi Sanitasi Total (1a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a)	649.610.000	907.626.000	34.602.000	1.115.060.000	1.022
9	Pendanaan OM (1b + 2b + 3b + 4b + 5b + 6b)	-	164.650.000	64.220.000	576.295.000	368,19

10	Belanja Langsung	-	-	-	-	-
11	Proporsi Belanja Sanitasi – B Langsung (7/10)	649.610.000	1.072.276.700	98.822.000	1.626.795.000	-
12	Proporsi Investasi Sanitasi – Total B.Sanitasi (8/7)	-	-164.650.700	-64.220.000	-576.295.000	-
13	Proporsi OM Sanitasi – Total B.Sanitasi (9/7)	-649.610.000	-907.626.000	-34.602.000	-1.115.060.000	-

Sumber : Bappeda Kab.Jenepono 2014

Tabel 4. 7. Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )	-	649.610.000	1.072.726.000	98.822.000		
1.1	Air Limbah Domestik	-	-	207.626.000	34.602.000		
1.2	Sampah rumah tangga	-	649.610.000	-	-	1.050.000	
1.3	Drainase perkotaan	-	-	700.000.000	-		
1.4	PHBS	-	-	164.650.000	64.220.000		
2	Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )	-	-	-	-	-	-
2.1	DAK Sanitasi	-	-	-	-	-	-
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	-	-	222.276.700	68.602.000	1.166.185.000	765,39
	Total Belanja Langsung	-	-	-	-	--	-
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	-	-	1,60	0,47	1,36	1,14

Sumber : APBD tahun 2010 – 2014, diolah

Tabel 4. 8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Jenepono Tahun 2011-2014

No.	S K P D	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
1	Total Belanja Sanitasi Kabupaten	4.918.000.00 0	8.816.000. 000	2.635.000. 000	9.950.000.00 0	95,58
2	Jumlah Penduduk	342.700	346.149	348.138	623.167	26,86
	Belanja Sanitasi Perkapita	14.350,74	25.468,80	7.568,83	15.966,83	39,38

Sumber : APBD dan BPS, *diolah*

Tabel 4. 9. Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita

No	SKPD	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Retribusi Air Limbah						
1.a	Realisasi retribusi						
1.b	Potensi retribusi						
2	Retribusi Sampah						
2.a	Realisasi retribusi						
2.b	Potensi retribusi						
3	Retribusi Drainase						
3.a	Realisasi retribusi						
3.b	Potensi retribusi						
4	Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)						
5	Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)						
6	Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)						

Sumber : ...



Tabel 4. 10. Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Jeneponto Tahun 2010-2014

No.	S K P D	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB harga konstan (struktur ekonomi) (Rp.)	788.378,73	830.779,96	891.012,96	956.277,77	1.025.837,01
2.	Pendapatan Perkapita (Rp.)	2.372.248	2.486.063	2.599.979	2.762.619	2.946.639
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,78	5,38	7,25	7,32	7,27

Sumber : PDRB Kab. Jeneponto 2014

Berdasarkan tabel 2.10 dapat dilihat bahwa PDRB harga konstan Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dapat dilihat berturut – turut tahun 2010 sebesar Rp. 788.378,73, tahun 2011 sebesar Rp. 830.779,96, tahun 2012 sebesar Rp. 891.012,96, tahun 2013 sebesar Rp. 956.277,77 dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.025.837,01. Pendapatan perkapita juga terus meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp. 2.372.248 menjadi Rp. 2.946.639 pada tahun 2014.

## **B. Keadaan Penduduk**

### **1. Sosial dan Budaya**

Kondisi Sosial Budaya menggambarkan keadaan prasarana pendidikan, jumlah penduduk miskin dan kawasan kumuh yang terdapat di wilayah Kabupaten Jeneponto.

#### **a. Prasarana Pendidikan**

Sampai dengan Tahun 2013 jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Jeneponto sebanyak 513 sekolah yang terdiri dari 286 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 1 Sekolah Luar Biasa (SLB), 69 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 21 Sekolah Menengah Atas (SMA), 16 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 38 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 50 Madrasah Tsanawiah (MTs) dan 30 Madrasah Aliyah (MA).

Tabel 4. 11. Jumlah Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jeneponto

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan								
	Umum						Agama		
	SD	SDL B	SLB	SLT P	SM A	SM K	MI	MTs	MA
Kecamatan Bangkala	46	-	-	8	1	2	12	9	6
Kecamatan Bangkala Barat	26	-	-	8	1	1	4	3	1
Kecamatan Tamalatea	30	-	-	9	4	-	2	6	5
Kecamatan Bontoramba	27	-	-	7	3	2	3	4	2
Kecamatan Binamu	33	2	1	10	5	8	5	4	2
Kecamatan Turatea	22	-	-	6	2	-	4	7	3
Kecamatan Batang	16	-	-	2	1	-	1	3	2
Kecamatan Arungkeke	14	-	-	2	1	1	2	2	2
Kecamatan Tarowang	18	-	-	4	-	1	2	4	3
Kecamatan Kelara	25	-	-	5	1	-	1	4	2
Kecamatan Rumbia	29	-	-	8	2	1	2	4	2
TOTAL	286	2	1	69	21	16	38	50	30

Sumber : BPS Kab.Jeneponto, 2014.

#### b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto berdasarkan pendataan penduduk miskin Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar 36.336 KK, dengan angka kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Bangkala dan terendah di Kecamatan Batang seperti yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 12. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
Kecamatan Bangkala	5.275
Kecamatan Bangkala Barat	3.364
Kecamatan Tamalatea	3.898
Kecamatan Bontoramba	3.415
Kecamatan Binamu	3.946
Kecamatan Turatea	3.438
Kecamatan Batang	1.866
Kecamatan Arungkeke	2.007
Kecamatan Tarowang	3.104
Kecamatan Kelara	2.751
Kecamatan Rumbia	3.272
TOTAL	36.336

Sumber : Bappeda Kab. Jeneponto, 2014

Tabel 4. 13. Jumlah Rumah Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)
Kecamatan Bangkala	11.555
Kecamatan Bangkala Barat	5.573
Kecamatan Tamalatea	9.378
Kecamatan Bontoramba	8.048
Kecamatan Binamu	10.864
Kecamatan Turatea	7.117
Kecamatan Batang	4.231
Kecamatan Arungkeke	4.184
Kecamatan Tarowang	5.393
Kecamatan Kelara	6.550
Kecamatan Rumbia	5.422
TOTAL	78.315

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2014

## 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jeneponto berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kota. Dari aspek kelembagaan daerah telah dibentuk beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari 14 Dinas, 6 Badan, 6 kantor, 4 staf ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 11 kecamatan. Dari lembaga Perangkat Daerah tersebut di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan program sanitasi antara lain:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan ini merupakan leading sektor dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah dimana dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan sanitasi Bappeda merumuskan dan menyusun strategi serta menyatukan semua stakeholder terkait sanitasi untuk menyelesaikan masalah sanitasi secara bersama-sama.

b. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

c. Dinas Pekerjaan Umum

Lembaga ini dibentuk dalam rangka membangun sarana prasarana umum. Pembangunan sarana ini juga termasuk sarana sanitasi seperti bak sampah, pengadaan kontainer sampah, TPA, IPLT, drainase dan lain-lain.

d. Dinas Kesehatan

Dinas ini dalam program sanitasi berfungsi mewadahi urusan-urusan di bidang kesehatan masyarakat, sehingga dalam upaya peningkatan

kesehatan lingkungan dan masyarakat dapat menjadi sarana pendukung bagi terciptanya program-program kesehatan.

e. Kantor Lingkungan Hidup Daerah (KLH)

Dalam penyusunan strategi penanganan permasalahan sanitasi, kondisi lingkungan daerah sangat memegang peran penting. Dampak lingkungan sangat terkait dengan permasalahan sanitasi. Oleh karena itu, keberadaan SKPD yang mengurus lingkungan berperan penting pula terhadap kebijakan pembangunan sanitasi.

Selain dari SKPD diatas, ada beberapa juga SKPD yang terkait dengan permasalahan sanitasi secara tidak langsung diantaranya:

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

Tidak bisa dipungkiri, permasalahan sanitasi juga berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganannya. Selama ini penanganan masalah sanitasi mengalami permasalahan terutama dalam pengoperasionalannya dan pemeliharannya sehingga sarana yang terbangun tidak memiliki aspek keberlanjutan dalam fungsi dan kegunaannya.

Perlu keterlibatan masyarakat dalam penuntasan masalah sanitasi dan untuk itu SKPD ini memiliki fungsi yang penting sebagai ujung tombak penguatan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat agar mendukung penyelesaian permasalahan sanitasi di masyarakat.

b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki kaitan dengan pembangunan sarana sanitasi di sekolah-sekolah dan bagaimana menanamkan kepada anak sekolah tentang pentingnya masalah sanitasi.

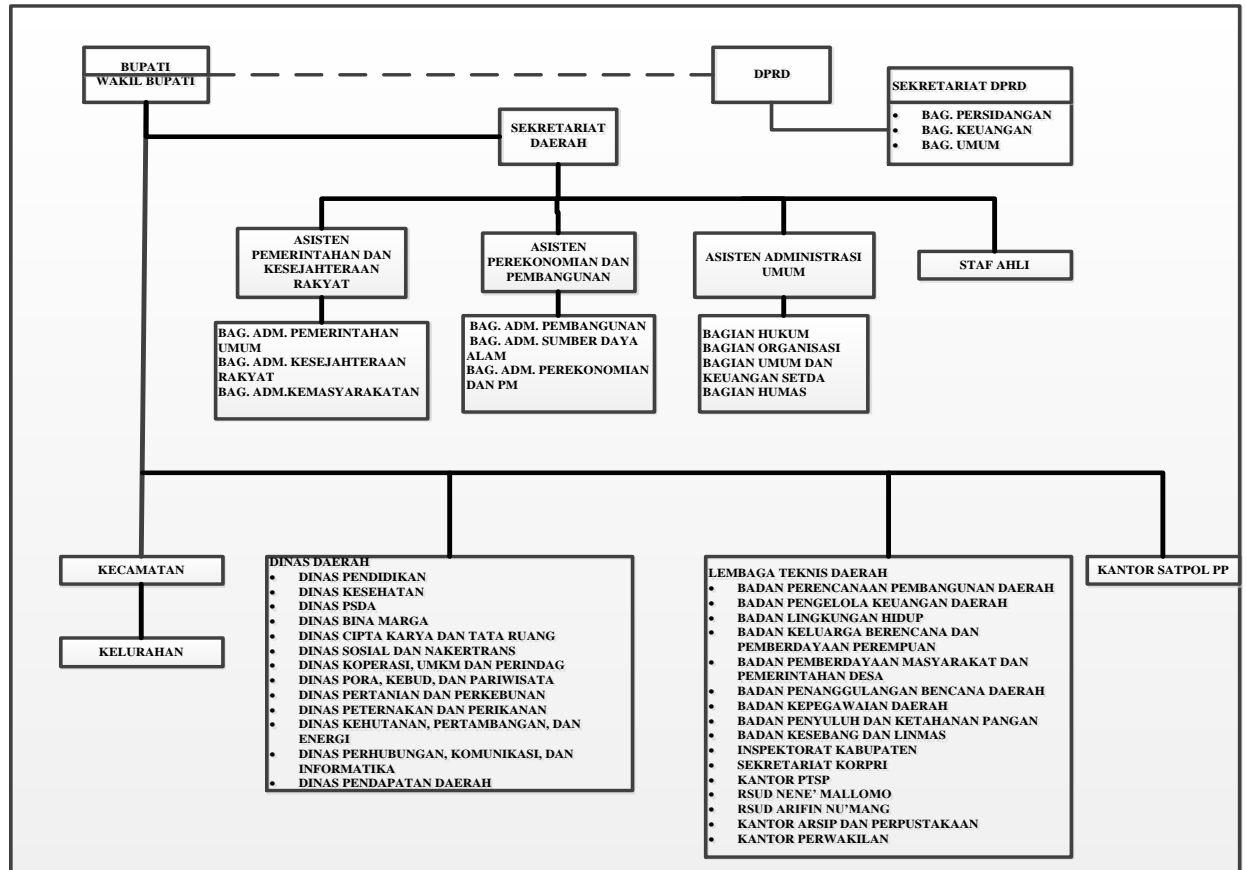
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah

Aspek komunikasi dan informasi menjadi penting saat permasalahan sanitasi menjadi hal yang tidak populer dimasyarakat. Dimana masalah sanitasi menjadi isu yang tidak penting dan tampak pada hasil usulan musrenbang dari masyarakat yang menempatkan usulan pembangunan sarana sanitasi sebagai hal yang jarang diusulkan.

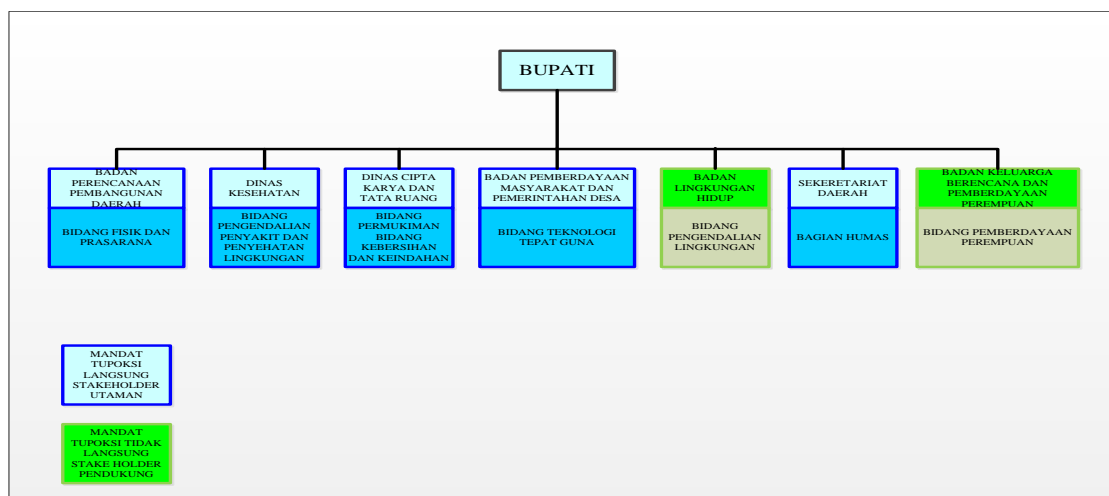
Untuk itu SKPD ini sangat penting untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat akan pentingnya arti sanitasi yang baik dan buruk.

*(Lihat Gambar 2.1. Struktur SKPD Yang Terkait Dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Jeneponto)*

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto



Gambar 2. Diagram SKPD terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Jeneponto





### **3. Komunikasi Dan Media**

Media dan komunikasi berfungsi untuk mengidentifikasi tentang pengalaman dan kapasitas Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan kampanye/pemasaran sanitasi serta sejauh mana pemahaman mereka mengetahui peran media massa dalam mendukung pembangunan sanitasi. Aspek komunikasi dan informasi menjadi hal penting saat permasalahan sanitasi menjadi hal yang tidak populer dan menjadi isu yang tidak penting dikalangan masyarakat.

Peran komunikasi dan media di Kabupaten Jeneponto di sektor sanitasi sampai saat ini, hanya sebatas kerjasama dengan program yang berbasis masyarakat seperti PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, Sanimas dan Pamsimas. Disamping itu, dinas kesehatan juga melakukan kegiatan komunikasi terkait sanitasi seperti Penyuluhan CTPS di sekolah dan masyarakat dan pemicuan STBM.

Tabel 4. 14. Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi

1.	Penyuluhan di masyarakat tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	2013	Dinas Kesehatan	Masyarakat memahami pentingnya melakukan CTPS	Desa/Kelurahan yang memiliki angka yang cukup tinggi penyakit diare	Dengan CTPS, kita terhindar dari penyakit dan hidup lebih sehat	Menurunkan angka anak yang terserang diare.
2.	Pelatihan pengelolaan 1 sampah rumah tangga	2013	BPMD	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan limbah ternak dan sampah rumah tangga	Kec.Binamu, Bangkala, Bangkala Barat, Arungkeke, Tarowang	Pengelolaan limbah ternak dan sampah rumah tangga	Pengelolaan limbah ternak dan sampah rumah tangga tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan tapi dapat menambah penghasilan
3.	Pemicuan STBM	2014	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari	11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak sehat meningkatkan resiko penyakit	Pemicuan STBM perlu dilakukan secara rutin dalam menunjang Kabupaten Jeneponto sebagai Kabupaten Sehat
4	Penyuluhan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	2014	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	Meningkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi air minum yang memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan	Masyarakat umum lokasi Pamsimas	Pemenuhan air minum standar kesehatan dan pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan	Program berbasis masyarakat lebih langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat

Tabel 4. 15. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi

No	Jenis Media (a)	Khalayak (b)	Pendanaan (c)	Isu yang Diangkat (d)	Pesan Kunci (e)	Efektivitas (f)
1.	Channel 1 TV Kabel. Penyiaran Liputan Kegiatan	Masyarakat Umum Kab. Jeneponto	PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan	Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Penerapan Konsep 3R dalam Pengelolaan Sampah	Tayangan Channel 1 TV Kabel dapat membantu meyakinkan target untuk dapat mengelola 1 sampah secara ramah lingkungan
2.	Website Kab. Jeneponto Pemuatan artikel dan pemberitaan	Masyarakat Umum Kab. Jeneponto	Program Kabupaten Sehat Kab. Jeneponto	Kabupaten Jeneponto berpredikat kabupaten sehat di tahun 2015	Masyarakat Kabupaten Jeneponto sehat sejahtera	Dengan pemberitaan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah wisata, sektor sanitasi merupakan hal terpenting dalam mendukung Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten Sehat di Sulawesi Selatan

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Jeneponto

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Jeneponto**

Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) mengajukan S kepada Kades
2. Kades menandatangani SPP kemudian diberikan kepada Bendahara Desa
3. Bendahara mengirimkan SPP kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK
4. Dana yang cair diberikan kepada Bendahara Desa untuk dibukukan dan dicatat dalam BKU kemudian diserahkan kepada pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) disertai bukti penerimaan
5. PPKD mempertanggungjawabkan kegunaannya.

Penggunaan ADD diperuntukkan pengeluaran penyelenggaraan Pemeintah Desa yaitu belanja rutin pemerintah desa, alokasi BPD

maksimal 30% dari ADD yang diterima. Sedangkan yang 70% untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan sarana publik atau pembangunan fisik. ADD di Kabupaten Jeneponto untuk 3 tahun terakhir mendapatkan jumlah yang sama untuk masing-masing desa. Kecamatan yang memperoleh bantuan Alokasi Dsna Desa dalam tahun berjalan dalam hal ini tahun 2014 memperoleh ADD dengan perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Nama Kecamatan dan Jumlah Perimbangan ADD

Nama Kecamatan	Dana Perimbangan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah
Kecamatan Bangkala	83.879.078	5.438.090	1.249.865	90.567.033
Kecamatan Bangkala Barat	93.256.881	5.393.345	1.300.012	99.950.238
Kecamatan Tamalatea	80.105.052	5.333.183	1.297.149	86.735.389
Kecamatan Bontoramba	82.637.772	5.285.247	1.268.177	89.191.196
Kecamatan Binamu	96.567.763	5.645.237	1.313.117	103.526.117
Kecamatan Turatea	70.837.782	5.280.373	1.270.098	77.388.253
Kecamatan Batang	70.637.396	5.276.393	1.252.970	77.166.759
Kecamatan Arungkeke	75.378.931	5.348.445	1.265.600	81.992.976
Kecamatan Tarowang	74.614.725	5.294.538	1.262.875	81.172.138
Kecamatan Kelara	65.895.358	5.326.983	1.368.563	85.649.830
Kecamatan Rumbia	75.369.875	5.736.926	1.296.453	79.269.815
TOTAL	805.607.013	59.358.760	14.144.879	952.609.744

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Somagede menerima dana ADD dari pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya dari pemerintah yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk keperluan masyarakat.

Pelaporan ADD Kabupaten Jeneponto Pelaporan ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Jenis laporan ADD meliputi:

1. Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, belanja publik ADD dan belanja transfer ADD.

2. Laporan Akhir pelaksanaan

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, tenaga kerja yang diserap dalam proyek ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke Tim Pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq tim fasilitas tingkat kabupaten. Sedangkan dalam pelaksanaan dan pelaporan ADD dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, Inspektorat dan Camat.

Di Kabupaten Jeneponto pelaporan keuangan alokasi dana desa pada masing-masing desa sudah mencapai pada tahap II, sedangkan untuk pengawasan ADD di Kabupaten Jeneponto, desa langsung dengan inspektorat untuk tingkatan kecamatan hanya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan ADD agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut implementasi Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Jeneponto dan tingkat pemberantasan kemiskinan masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Tabel 5. 2. Jumlah Keluarga Miskin

Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK) Tahun 2013	Jumlah Keluarga Miskin (KK) Tahun 2014	Selisih Pengurangan	Persentase (%)
Kecamatan Bangkala	5986	5275	711	11.7
Kecamatan Bangkala Barat	4536	3364	1172	25.5
Kecamatan Tamalatea	3968	3898	70	1.3
Kecamatan Bontoramba	3867	3415	452	11.3
Kecamatan Binamu	4268	3946	322	7.8
Kecamatan Turatea	3692	3438	254	6.8
Kecamatan Batang	2006	1866	140	6.2
Kecamatan Arungkeke	2231	2007	224	10.5
Kecamatan Tarowang	3569	3104	465	13.2
Kecamatan Kelara	2986	2751	235	7.1
Kecamatan Rumbia	3370	3272	98	2.9
TOTAL	40479	36336	4143	-

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto diolah 2014

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jeneponto tahun 2014, angka kemiskinan selama periode tahun 2014 terlihat bahwa secara keseluruhan Kecamatan yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan signifikansi angka penurunan tingkat kemiskinan paling besar interval 10%-25% terjadi pada Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tarowang yang selanjutnya di susul oleh Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bontoramba, dan Kecamatan Arungkeke.

Sedangkan penurunan yang berada pada angka signifikansi 1%-9% yaitu Kecamatan Kelara sebesar 7,1%, Kecamatan Binamu 7,8%, Kecamatan Turatea 6,8%, Kecamatan Batang 6,2%, Kecamatan Rumbia 2,9%, dan Kecamatan Tamalatea dengan tingkat penurunan 1,3%. Berikut uraian alokasi dana desa di Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Jeneponto yang diuraikan sebanyak 3 Desa dari 3 Kecamatan.

### **1. Alokasi Dana Desa Bontotangnga di Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto**

Desa Bontotangnga dengan luas wilayah 5,97 Km<sup>2</sup> dengan jarak ibukota kecamatan sejauh 13 Km<sup>2</sup> dan ibu kota kabupaten 15 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 3 dusun, 6 RW/RK, 14 RT, dan 5 Pamong Desa atau kepala desa. Di Desa Bontotangnga juga memiliki sebanyak 12 industri kerajinan rumah tangga dan 1 industri kecil. Luas wilayah dari Desa



Bontotangnga yang berkisar pada 5,97 Km<sup>2</sup> menjadi salah satu faktor pertimbangan sehingga masuk dalam daftar kegiatan yang di masukkan terdapat 5 yang masuk dalam rangking tertinggi dengan 11 kegiatan. Adapun hasil implementasi Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3. Realisasi Alokasi Dana Desa Bontotangnga

No	Name Program/Kegiatan	Vol/sat	Lokasi
1	Pengerasan Jalan	500 M	Desa Bontotangnga
2	Pengerasan Jalan	500 M	Dusun
3	Rabat Beton Pembuatan Talud	150 M	Dusun
4	Rabat Beton	500 M	Dusun
5	Rabat Beton	170 M	Dusun Barae
6	Rabat Beton	100 M	Dusun
7	Pengerasan Jalan	150 M	Dusun
8	Pembangunan Jembatan	150 M	Dusun Bangko
9	Pengadaan air bersih		Dusun
10	Pembangunan drainase		
11	Rabat Beton	170 M	Dusun

Sumber: Data Laporan ADD Desa Bontotangnga

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa implementasi ADD di Desa Bontotangnga dengan 5 program dan 11 kegiatan di laksanakan di tempat, yakni beberapa dusun. Pengerasan jalan dilakukan di Desa Bontotangnga secara bertahap, dimana tahap pertama dilakukan

sepanjang 500 M dan demikian juga pada tahap kedua 500 M. Demikian pula dengan pembangunan Rabat Beton Pembuatan Talud yang pada tahap pertama di laksanakan sepanjang 150 M, tahap kedua sepanjang 50 M, dan tahap ketiga sepanjang 100 M. Sedangkan pembangunan drainase dan pengadaan air bersih dilakukan di satu dusun saja yaitu dusun baringeng. Pelaksanaan pembangunan di Desa Bontotangga dilakukan secara bertahap karena jarak tempat pengambilan bahan baku cukup jauh, belum lagi akses jalan yang cukup menghambat pengerjaan.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi faktor penghambat pada saat kegiatan dilaksanakan adalah jarak penyedia bahan baku dan lokasi pengerjaan cukup jauh, dimana jarak dari ibu kota adalah 13 Km dari Desa Bontotangga, sedangkan lokasi pengerjaan masih harus memasuki Desa Bontotangga sehingga kegiatan harus dilakukan secara bertahap.

## **2. Alokasi Dana Balang Baru Desa di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto**

Desa Balang Baru dengan luas wilayah 4,50 Km<sup>2</sup> dengan jarak ibukota kecamatan sejauh 0 Km<sup>2</sup> dan ibu kota kabupaten 3. Terdiri dari 10 RW/K, 22 RT, dan 9 Pamong Desa atau kepala desa. Di Desa Balang Baru juga memiliki sebanyak 18 industri kerajinan rumah tangga dan 1 industri kecil. Wilayah Desa Balang Baru merupakan desa yang paling dekat atau berada di wilayah poros Kota Kecamatan atau Kelurahan

Balang Baru. Adapun hasil implementasi ADD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 4. Realisasi ADD Desa Balang Baru

No	Name Program/Kegiatan	Vol/sat	Lokasi
1	Pengerasan Jalan di lingkungan	200 M	Dusun Langgull
2	Pembangunan Dekker	1 Unit	Duaun
3	Pembuatan Talud Penahan Tanah	130 M	Mangarabombang
4	Pembuatan Drainase	70 M	Dusun
5	Pembangunan Dekker	1 Unit	Mangarabombang
6	Pembangunan Talud	150 M	Langgull
7	MCK	I Unit	

Sumber: Data Laporan ADD Desa Balang Baru

Letak Kelurahan Balang Baru yang berada di poros jalan Kabupaten dan dalam wilayah Kecamatan Balang Baru dengan infrastruktur yang sudah memadai sehingga hanya memperoleh 8 kegiatan yakni pengerasan jalan, pembuatan talud, dan rabat beton di lingkungan, pembangunan dekker, pembuatan talud penahan air dan pembuatan dekker di Manggarabombang, pembuatan drainase, dan pembuatan MCK.

### **3. Alokasi Dana Desa Pappalluang di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

Desa Pappalluang dengan luas wilayah 5,09 Km<sup>2</sup> dengan jarak ibukota kecamatan sejauh 10 Km<sup>2</sup> dan ibu kota kabupaen 15 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 3 dusun, 7 RW/K, 12 RT, dan 5 Pamong Desa atau kepala

desa. Di Desa Pappalluang juga memiliki sebanyak 3 industri kerajinan rumah tangga. Dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai dan potensi pengembangan wilayah dan masyarakat menjadi salah satu faktor pertimbangan sehingga usulan kegiatan yang di masukkan terdapat 7 kegiatan. Adapun hasil implementasi ADD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 5. Realisasi ADD Desa Pappalluang

No	Name Program/Kegiatan	Vol/sat	Lokasi
1	3	4	5
1	Rabat Baton	150 M	Dusun Poros Bilalang
2	Pembangunan Irigasi Desa	250 M	Dusun Balnang
3	Beton Panggo Pembangunan	150 M	Dusun Poros Bilalang
4	Jembatan Panggo Perkerasan	1 Unit	Dusun Poros Bilalang
5	Jalap Tomanjeng Perintlsan Jalan	240 M	Dusun Bilalang
6	Malleareng Pao Posyandu	1000	Dusun Bilalang
7	Permanen	1 Unit	Dusun Bilalang

Sumber: Data Laporan ADD Desa Pappalluang

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa wilayah desa Pappalluang yang memperoleh bantuan pembangunan adalah dusun Bainang dan dusun bilalang. Dusun Bainang memperoleh pembangunan sesuai dengan infrastruktur yang dibutuhkan seperti rabat beton, pembangunan irigasi desa. Pembangunan irigasi desa akan membantu para petani dalam meningkatkan hasil pertanian seperti padi dan jagung.

Demikian pula dengan fasilitas infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan akses jalan masyarakat melakukan aktivitas.

Dusun Bilalang memperoleh pembangunan infrastruktur pengerasan jalan tamanjeng dan perintisan jalan yang menghubungkan antara jalan tomanjeng dan jalan Pao. Sedangkan untuk dusun Kaloling memperoleh pembangunan posyandu permanen, rabat beton, dan pembangunan jembatan.

Sebagian besar pembangunan infrastruktur di desa Pappalluang menitik beratkan pada infrastruktur jalan, padahal selain jalan masyarakat Desa Pappalluang juga membutuhkan penyediaan air bersih, karena sumber air bersih bagi masyarakat Desa Pappalluang yang selama ini dikonsumsi berasal dari air sungai. Meskipun ada yang memiliki sumur namun tidak dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan masyarakat.

## **B. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto**

Dalam kajian ini akan dilihat kesesuaian Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa. Kemudian akan dilihat pula hubungan ADD dengan tingkat kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Jeneponto. Analisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan variable Alokasi Dana Desa (X) dan variable Kesejahteraan Masyarakat (Y). Adapun hasil analisis diuraikan dari penjelasan berikut:

Tabel 5. 6. Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	16.397	16.876		1.972	.001			
	ADD	2.975	1.928	.457	1.943	.003	.457	.457	.457

a. Dependent Variable: KM

Hasil output pengolahan data dengan SPSS seperti ditunjukkan di atas, selanjutnya dapat diketahui persamaan regresi sederhana dari modal penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 16.397 + 2.975X + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi diatas diketahui bahwa nilai konstanta yang diperoleh sebesar 16.3997 menunjukkan bahwa jika nilai variable X (ADD) sama dengan nol maka diperkirakan pendapatan masyarakat perkapita sebesar 16.397 (dalam rupiah).

Nilai koefisien variabel X (ADD) yang diperoleh sebesar 2.975 menunjukkan bahwa variabel X (ADD) memiliki hubungan positif yang

searah dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berarti setiap peningkatan nilai ADD sebesar 16 juta maka diperkirakan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sebesar Rp. 16.397 atau sekitar 16.000 perkapita dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Tabel 5. 7. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.457 <sup>a</sup>	.209	.121	6.04915	.209	2.379	1	9	.003

a. Predictors: (Constant), ADD

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk koefisien determinasi dari model penelitian, dimana korelasi dilambangkan dengan nilai R dan determinasi atau daya ramal model ditunjukkan dengan nilai  $R^2$ , maka diperoleh bahwa korelasi (keeratan hubungan) antara anggaran dana desa (ADD) dengan kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 0,457 yang berarti bahwa ADD memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai R Square (Determinasi) menunjukkan daya ramal model adalah sebesar 0,209 yang berarti bahwa Alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya kesejahteraan masyarakat sebesar 20.9% sedangkan selebihnya sebesar 79,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikan dan membuktikan hipotesis yang peneliti ajukan maka dilakukan uji t dan diperoleh output SPSS tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,943 dengan Sig 0,003. Untuk mengetahui tingkat signifikansi model penelitian, maka nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Nilai t hitung untuk derajat kesalahan 5% ( $\alpha=0,05$ ) dan DF 9 ( $n-k = 11-2=9$ ) adalah sebesar 1.833 yang berarti bahwa t hitung (1.943) lebih besar dari t tabel 1.833 sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan “anggaran dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto” terbukti secara empiris dan dapat diterima.

### **C. Pembahasan**

Penyaluran anggaran dana desa melalui beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ini adalah: (1) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan keputusan perbekel; (2) Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan



verifikasi oleh tim pendamping kecamatan; (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa; (4) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan VI yang di lengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. (5) Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya.

Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan.

Selain itu pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan

kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasar Musyawarah Desa.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto terbukti secara empiris dan dapat diterima. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil olah data SPSS yang menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 1,943 dengan Sig 0,003.  $t$  tabel 1.833 yang berarti bahwa  $t$  hitung (1.943) lebih besar dari  $t$  tabel (1.833) sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2013 ke tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan dengan berkurangnya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jeneponto berdasarkan data BPS tahun 2014. Dimana tahun 2013 jumlah keluarga miskin sebanyak 40.479 KK dan berkurang ditahun 2014 menjadi 36.336 KK. Ini berarti terdapat 4.143 KK yang mengalami perbaikan kesejahteraan atau sekitar 10.2% dari tahun 2013.

## **B. Saran**

1. Perlunya mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan ADD semaksimal mungkin dan minimal 10% sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 37/2007.
2. Perlunya pengawasan terhadap pengelola keuangan ditingkat desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia.
3. Peran serta masyarakat didalam pembangunan desa sangat penting sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendekatan-pendekatan maupun sosialisasi terhadap masyarakat agar pembangunan didesa dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini dapat dilakukan pengukuran mengenai indikator-indikator sosial ekonomi seperti peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana setelah dilaksanakannya proyek peningkatan daerah yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2003. *Kumpulan Undang- undang.Yayasan Penguatan Partisipasi inisiatif dan kemitraan Masyarakat sipil (YAPPIKA)*, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Bertakusumah, Deddy Supriady. 2002 *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhingan, M.L.2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*Jakarta : Erlangga.
- Nasir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia,Jakarta
- Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Departemen Dalam Negeri).
- Sandan Gregorius, dkk 2006. *Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan Rakyat Desa*.Yogyakarta : FPPD Yogyakarta.
- Siagian, Sondang, P. 1996. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sujardi, 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani Ahmad, *Jeneponto Dalam Angka Tahun 2009*, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto.